

The Voluntary Carbon Market **Explained**



**Bab 2:
Apa peran
pemerintah
dalam VCM?**

Bab 2: Apa peran pemerintah dalam VCM?

Peran aktif pemerintah dalam pasar karbon sukarela (VCM) antara lain menerbitkan kebijakan, peraturan, dan upaya perlindungan terkait segala hal dalam VCM, menciptakan daya dukung terhadap proyek atau program VCM, dan mendukung proyek atau program VCM di wilayah yurisdiksi masing-masing.

Siapa yang mengatur VCM?

VCM diatur oleh standar emisi GRK swasta yang menetapkan aturan untuk penerbitan, pemantauan, dan sertifikasi pengurangan dan penyerapan gas rumah kaca (GRK). Karakteristik VCM yang bersifat mandiri dan sukarela menjadikannya pembeda dari program kredit karbon yang diwajibkan pembuat kebijakan seperti *Clean Development Mechanism* (CDM), yang mengharuskan pengembang proyek untuk mendapatkan surat persetujuan dari otoritas tingkat nasional yang ditunjuk negara untuk mendaftarkan proyek CDM.

Karakter mandiri VCM menjadikannya gesit dan fleksibel. Hal ini memungkinkan VCM untuk mendukung mitigasi iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan pembiayaan untuk teknologi baru, **solusi berbasis alam** (NbS), dan kegiatan mitigasi

perubahan iklim penting lainnya tidak verada dalam ranah dukungan kebijakan publik. Namun, seperti beragam investasi lainnya, proyek VCM juga memiliki potensi untuk melanggar peraturan atau kepentingan bersama, terutama jika kegiatan VCM melupakan hak-hak warga sekitar, mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, atau tidak selaras dengan tujuan dan peraturan pemerintah.

Badan usaha bergerak dalam VCM untuk mengurangi dan menghilangkan emisi GRK yang verada diluar ranah kewajiban pemerintah. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pemerintah tidak memiliki peran dalam mempercepat, mendorong, atau mengatur instrumen investasi VCM. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan, peraturan, dan upaya perlindungan terkait untuk memandu pengembangan proyek VCM di wilayah yurisdiksi masing-masing dan menarik investasi VCM yang menguntungkan. Badan usaha dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi VCM dan secara aktif mendorong investasi dalam proyek atau program tertentu yang menghasilkan kredit karbon. Badan usaha juga dapat secara langsung terlibat dalam pengembangan proyek dan program.

Meskipun VCM diatur oleh standar swasta, pemerintah juga dapat terlibat dengan dan mendapatkan keuntungan dari VCM. Pemerintah dapat berperan secara aktif dengan VCM dalam dua cara: pertama, sebagai otoritas pengatur di "negara tuan rumah" atau tempat kegiatan VCM berlangsung dan kedua, sebagai investor dalam kegiatan VCM. Dalam kedua kasus tersebut, pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dan politik untuk transaksi VCM dengan mengklarifikasi aturan keterlibatannya dalam VCM.

Bagaimana pemerintah dapat terlibat dengan VCM secara proaktif dan strategis?

Pemerintah negara tuan rumah dapat **mengembangkan strategi** untuk secara proaktif terlibat dengan VCM. Keterlibatan strategis pemerintah dapat menarik pendanaan karbon untuk mendukung prioritas kebijakan nasional dan meminimalkan risiko dari kegiatan VCM yang dirancang dengan buruk. Ketika mengembangkan strategi untuk keterlibatan pemerintah dalam VCM, pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan pendanaan untuk implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan prioritas nasional lainnya. Setelah pemerintah negara tuan rumah mengklarifikasi kebutuhan pembiayaan NDC mereka, mereka

dapat menentukan peran VCM untuk mendukung kebutuhan pembiayaan ini. Proses penentuan peran VCM dalam membiayai NDC melibatkan identifikasi aksi mitigasi perubahan iklim yang tidak dapat didukung oleh kebijakan publik serta membuat keputusan tentang **penyesuaian lanjutan (*corresponding adjustment*) berdasarkan Pasal 6**.

Pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dan politik untuk aktivitas transaksi VCM dengan menentukan peraturan VCM di negara mereka, atau dengan kata lain menyatakan bahwa pemerintah telah siap untuk mendukung pengembang proyek dan investor, dan mengklarifikasi aturan, regulasi, dan upaya perlindungan terkait. Pemerintah negara tuan rumah dapat menetapkan kerangka hukum dan peraturan untuk memastikan bahwa VCM beroperasi dalam kepastian hukum dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

VCM juga bisa mempengaruhi kebijakan publik dan pasar karbon wajib (*compliance*), dan dalam beberapa kasus, program kredit karbon sukarela juga secara langsung berinteraksi dengan skema pasar karbon pemerintah. Kebijakan penetapan harga karbon **di California, Kolombia, Jerman, Afrika Selatan, Thailand, atau Inggris menunjukkan** contoh bagaimana pemerintah memanfaatkan VCM untuk mencapai tujuan iklim. Di Kolombia

dan Afrika Selatan, misalnya, perusahaan dapat membayar kewajiban pajak karbon nasional dengan membeli kredit karbon dari proyek VCM dalam negeri.

Apa peran pemerintah dalam VCM?

Pemerintah dapat memanfaatkan pendanaan dari VCM dengan terlibat dalam VCM sebagai regulator, pendukung, atau fasilitator:



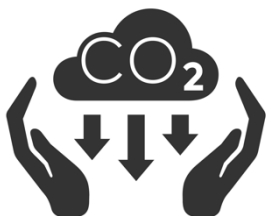
Sebagai regulator, Pemerintah dapat menentukan standar kinerja lingkungan dan sosial atau upaya perlindungan yang mengikat pengembang proyek. Lingkungan kebijakan yang stabil dan dapat diprediksi tentu mengurangi risiko investasi dan membantu investor swasta menyelaraskan rencana mereka dengan kebijakan publik. Upaya pemberantasan korupsi, kepatuhan hukum, pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan Warga Lokal ([IP & LC](#)), dan penegasan hak serta hak atas tanah/lahan juga turut mengucurkan investasi swasta ke dalam proyek VCM. Ketika pemerintah menetapkan dan menegakkan hak atas tanah serta sumber daya, pemerintah juga memperjelas **Hak atas karbon**—didefinisikan sebagai siapa yang

memegang hak untuk mendapatkan manfaat dari pengurangan dan penyerapan emisi GRK — dan membantu pengaturan **Pembagian Manfaat**.

Peraturan pemerintah dapat mempengaruhi klaim perusahaan terkait **penggunaan kredit karbon**. Pemerintah dapat mendorong penggunaan kredit karbon berintegritas tinggi dengan mengembangkan kebijakan seperti kewajiban pengungkapan aktivitas keberlanjutan, menolak proposal advokasi dari badan usaha atau memberkan izin kepada badana usaha yang berusaha melemahkan aksi iklim, serta memperjelas penegakkan hukum kepemilikan lahan.

Akhirnya, pemerintah dapat memberikan kejelasan tentang bagaimana kegiatan VCM akan dipertimbangkan berdasarkan hukum dan peraturan negara, termasuk untuk **penyesuaian lanjutan (*corresponding adjustment*) berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris**. Sementara beberapa pembeli mengharapkan *corresponding adjustment* pada kredit VCM, ketersediaan *corresponding adjustment* tergantung pada kemauan politik dan kapabilitas teknis negara tuan rumah VCM. Pemerintah dapat mengurangi ketidakpastian dengan membuat pernyataan publik tentang bagaimana memberikan *corresponding adjustment* untuk transaksi VCM. Pernyataan-pernyataan ini dapat tergantung pada kapabilitas teknis

pemerintah untuk melakukan *corresponding adjustment*. Pemerintah juga dapat membatasi *corresponding adjustment* pada bagian-bagian NDC yang membutuhkan pendanaan iklim, jenis aktivitas mitigasi yang lebih mahal atau menawarkan *corresponding adjustment* dengan syarat bahwa negara akan menerima manfaat finansial dari penjualan kredit karbon sebagai imbalannya.



Sebagai pendukung, pemerintah dapat mendukung atau mensponsori proyek dan program VCM. Di beberapa negara, lembaga pemerintah—seperti otoritas taman nasional (misalnya, dalam kasus proyek kehutanan) atau kotamadya (misalnya, dalam kasus proyek pengelolaan limbah) — bertindak sebagai pendukung proyek dan menggunakan pendanaan karbon untuk mendukung investasi publik. Misalnya, di Guatemala, otoritas taman nasional bertindak sebagai pendukung **proyek GuateCarbon dengan** memberikan hak penggunaan lahan kepada masyarakat dan organisasi swasta yang melakukan penanaman hutan berkelanjutan dan memantau cagar alam.

Proyek Sampah Kota Daegu di Republik Korea Selatan adalah

contoh kotamadya yang bertindak sebagai pendukung proyek, adapun proyek **Weatherization for Low-Income Dwellings** di Negara Bagian Maine AS adalah contoh pemerintah daerah yang bertindak sebagai pendukung proyek. Pemerintah juga dapat mendukung program teritorial berskala besar dalam bentuk program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Plus (REDD+) berbasis daerah atau yurisdiksi yang menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi GRK di keseluruhan bentang alam. Jika program tersebut terakreditasi di bawah **standar emisi GRK VCM**, maka pemerintah dapat menghasilkan dan menjual kredit tingkat program di VCM. Program berbasis yurisdiksi juga memungkinkan pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan publik dengan tujuan REDD+ dan mengakses pendanaan karbon secara langsung. **REDD+** juga menawarkan opsi kredit yurisdiksi yang mengharuskan pemerintah menjadi pendukung program-program tersebut. Pemerintah dapat mengadopsi **aturan bersarang atau nesting** yang memungkinkan integrasi proyek dan program daerah atau subnasional ke dalam program REDD+ nasional.



Sebagai fasilitator, pemerintah dapat menarik dan

mengelontorkan pendanaan untuk VCM. Bagaimana pemerintah berkomunikasi tentang VCM dan terlibat dengan pelakunya VCM mempengaruhi kepercayaan publik terhadap VCM, yang juga dapat mendorong atau menghambat pengembangan proyek VCM. Dengan mendorong pengembangan proyek VCM dalam negeri, pemerintah dapat menggunakan VCM untuk mendorong investasi dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim yang kekurangan dana, seperti program memasak bersih (*clean cooking*), mengembangkan pasokan energi tersebar atau terdesentralisasi, atau agroforestri dan solusi berbasis alam (NbS) lainnya.

Pemerintah dapat mengelontorkan aliran keuangan dari VCM ke sektor atau prioritas kebijakan tertentu di mana keuangan paling dibutuhkan dengan mendefinisikan kriteria untuk keterlibatan dalam VCM dan dengan mengenali standar, metodologi, atau protokol VCM untuk sektor-sektor tertentu. Ini, bersama dengan publikasi informasi dan data, meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar. Selain itu, pemerintah dapat menciptakan registri untuk melacak dan memantau kredit dan proyek karbon, sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah untuk VCM dan meningkatkan transparansi kegiatan terkait VCM di negara mereka.

Bacaan lebih lanjut

Climate Focus & UNDP. (2023). VCM Access Strategy Toolkit. Retrieved from <https://vcmintegrity.org/wp-content/uploads/2023/05/VCMI-VCM-Access-Strategy-Toolkit-1.pdf>

Streck, C., Dyck, M., Mithra Manirajah, S., & Fernandez Armenteros, M. (2022). Voluntary Carbon Market: Considerations for host countries. Retrieved September 28, 2023, from <https://climatefocus.com/publications/voluntary-carbon-market-considerations-for-host-countries/>

Ucapan Terima Kasih

Penulis: Melaina Dyck, Charlotte Streck, dan Danick Trouwloon

Desainer: Sara Cottle

Kontributor: Leo Mongendre, Laura Carolina Sepúlveda, dan Theda Vetter

Penerjemah ke Bahasa Indonesia: Bruce Mecca

Tanggal publikasi: Oktober 2023

Voluntary Carbon Market Explained (VCM Primer) didukung oleh *Climate and Land Use Alliance (CLUA)*. Para penulis berterima kasih kepada pengulas dan mitra yang dengan murah hati menyumbangkan pengetahuan dan keahlian untuk *Primer* ini.